

## **Analisis Disparitas Pendapatan Antara Jawa timur bagian barat dengan jawa timur bagian timur tahun 2004-2010**

**Stefanus Satria W.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Email: stefanus.satria508@gmail.com

### *ABSTRAK*

*Adanya ketimpangan antar wilayah disebabkan adanya perbedaan sumber SDA dan SDM yang merupakan faktor utama terjadinya ketimpangan dalam pendapatan maupun pembangunan. Setelah pemerintah pusat memberikan kewenangan daerah untuk mengelola SDA yang ada disetiap daerah untuk dikelola berdasarkan kemampuan daerah tersebut yang mendasari adanya tingkat pendapatan yang berbeda disetiap wilayah, yang berujung dengan adanya disparitas.*

*Dengan menggunakan metode kuantitatif dan dihitung dengan menggunakan alat analisis Indeks Entrophy Theil dan LQ (Location Quotient) dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian. Akan diketahui besarnya disparitas pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Hasilnya akan nampak adanya disparitas pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur dan akan terlihat sektor-sektor yang menjadi sektor basis pada setiap wilayah Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Barat.*

**Kata Kunci : disparitas pendapatan, ketimpangan pembangunan, pertumbuhan ekonomi**

---

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan ekonomi dimanapun pada umumnya akan mengalami suatu dilema antara kepentingan perkembangan ekonomi dan pemerataan. Perkembangan ekonomi akan menghasilkan output nasional yang akan dinikmati oleh warga negara. Pembagian output nasional yang dihasilkan laju pertumbuhan ekonomi yang merata dapat dicapai apabila pembangunan output nasional atau hasil pembangunan ini tidak merata, hanya dinikmati oleh sebagian warga negara maka terjadi kesenjangan dalam pembagian pendapatan antar warga negara, kesenjangan ini pada gilirannya akan sangat rentan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada akhirnya bias menimbulkan gejala atau konflik nasional (BPS, 2006). Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108).

Pada kenyataannya, kondisi tiap wilayah tidak sama antara satu dengan yang lain, seperti potensi ekonomi, jumlah penduduk, ketersediaan sarana/prasarana dan kualitas sumberdaya manusianya, sehingga berbagai kebijakan ekonomi yang diterapkan pada suatu wilayah belum tentu bisa diterapkan pula di wilayah lain. Dengan kata lain, pertanyaan “di mana aktivitas manusia terjadi (*where*)” yang merupakan kajian tambahan dalam ilmu ekonomi regional, belum tercakup ke dalam ilmu ekonomi konvensional. Disamping itu, aspek nonekonomi juga masih cenderung diabaikan. Akibatnya, antara tujuan untuk mencapai peningkatan pendapatan nasional serta pendapatan per kapita selalu diikuti kesenjangan, sehingga ketimpangan hasil-hasil pembangunan antar daerah tidak bisa dihindari.

Ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugerah (*endowment*), misal sumberdaya alam, kapital, keahlian/ketrampilan, bakat atau potensi, atau sarana dan prasarana. Sedangkan faktor yang kedua adalah kesalahan tumpuan strategi pembangunan. Sasaran-sasaran pembangunan diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan (Dumairy, 1996:56)

Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat

kegiatan ekonomi lebih tinggi daripada yang telah dicapai pada periode waktu sebelumnya (Sukirno, 1996:15). Salah satu indikator penting untuk mengetahui indikator pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB dan suatu masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila pendapatan perkapita menurut harga konstan atau pendapatan perkapita riil terus-menerus bertambah. Laju pertumbuhan PDRB disumbang oleh sembilan (9) sektor, yaitu sektor pertanian ; pertambangan dan penggalian ; industri pengolahan ; listrik, gas dan air bersih ; bangunan ; perdagangan, hotel dan restoran ; pangangkutan dan komunikasi ; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ; dan jasa-jasa.

Secara harfiah, pembangunan bertujuan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan, namun dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga hasil pembangunan tersebut belum dinikmati oleh penduduk di Jawa Timur secara merata. Ketimpangan di Propinsi Jawa Timur selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita, tetapi ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula berupa disparitas pendapatan antar daerah, yakni antar pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa disparitas sektoral dan disparitas regional.

Adanya disparitas pendapatan antar daerah di Jawa Timur disebabkan berbagai kendala, baik letak geografis maupun potensi sumber daya alam yang dimiliki masing-masing daerah yang tidak sama, bahkan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam pembangunan juga menjadi kendala dalam pertumbuhan ekonomi.

Disparitas pendapatan antar daerah yang disebabkan oleh terpusatnya investasi suatu daerah. Pada kenyataannya besaran investasi di tiap wilayah dan tiap sektor berbeda-beda. Keputusan investasi di tiap wilayah dan tiap sektor sangat dipengaruhi oleh dua pelaku utamanya, yaitu pengusaha dan pemerintah

melalui kebijakan-kebijakannya. Bagi pemerintah investasi dilakukan dengan harapan investasi tersebut dapat memberikan efek *multiplier* bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, besaran efek *multiplier* investasi di tiap wilayah berbeda-beda tergantung pada besaran hasrat konsumsi masyarakat di tiap wilayah baik terhadap barang produksi lokal maupun barang dari luar daerahnya, tingkat pajak di tiap wilayah, serta banyak faktor lainnya kondisi ini tentu saja dapat menjadi pendorong besaran investasi yang berbeda antar wilayah. Dalam hal ini pemerintah harus memilih sektor-sektor yang apabila berkembang mampu mendorong kemajuan sektor-sektor lain hingga pada akhirnya dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan (plato), zona tengah (gunung berapi), dan zona utara (lipatan). Selain pembagian ke dalam zona-zona, wilayah di Jawa Timur, pembagian wilayah juga dapat dilihat berdasarkan budaya dan adat istiadat yang ada di Jawa Timur khususnya Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur. Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengahan, sehingga kawasan ini dikenal sebagai Mataraman; menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah tersebut meliputi eks-Karisidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan). Dan juga bisa dipengaruhi oleh bentuk arsitektur. Sedangkan pada wilayah di Jawa Timur Bagian Timur bisa dikenal sebagai daerah Tapal Kuda. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk Tapal Kuda, daerah Tapal Kuda meliputi (Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi) (Kantor Perwakilan Jatim : 2011).

Berdasarkan fenomena perbedaan budaya antara Provinsi Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur maka ada pula perbedaan karakteristik dalam pencarian mata pekerjaan sehingga dapat mempengaruhi besarnya pendapatan antara wilayah yang berada di Jawa Timur bagian barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari PDRB antara Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur Bagian Timur.

Perbedaan Pendapatan antara wilayah yang berada Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Dapat terlihat dari PDRB harga Konstan tahun 2000 periode 2004-2010 antara wilayah yang berada di Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

Tabel 1: **PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Bagian Barat menurut Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Periode 2004 – 2010**

	Madiun	Ngawi	Magetan	Ponorogo	Pacitan
2004	848,337.93	2,282,391.93	2,399,092.59	2,466,589.74	1,149,278.14
2005	889,322.53	2,385,681.99	2,392,632.56	2,573,609.41	1,121,289.93
2006	937,574.10	2,510,075.52	2,507,673.01	2,694,520.41	1,162,300.55
2007	995,215.25	2,639,717.89	2,639,069.03	2,871,341.71	1,211,931.91
2008	1,057,364.29	2,784,027.20	2,920,176.01	3,043,363.54	1,345,501.20
2009	2,900,459.11	2,943,159.71	3,092,234.67	3,149,657.34	1,453,543.02
2010	3,072,411.06	3,122,192.24	3,271,146.34	3,331,987.08	1,548,768,04

Sumber: BPS Pusat Tahun Dasar 2000

Jika dilihat pada tabel 1.1 Jawa Timur bagian Barat PDRB mulai dari tahun 2004 – 2010 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan hal tersebut disebabkan berdasarkan pengaruh dari sektor unggulan tiap wilayah yang tidak terlalu memberikan kontribusi besar pada Propinsi.

Tabel 2: **PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur Bagian Timur menurut Harga Konstan Tahun Dasar 2000 Periode 2004 – 2010**

	Probolinggo	Lumajang	Jember	Situbondo	Bondowoso	Banyuwangi
2004	4.949.682,69	4.214.696,45	7.805.730,93	2.573.128,01	1.684.461,76	7.664.836,49
2005	5.126.680,92	4.793.733,63	8.236.276,67	2.703.988,41	1.772.844,07	8.414.262,77
2006	5.418.554,86	5.044.176,39	8.705.996,37	2.852.394,95	1.871.753,66	8.815.927,14
2007	5.742.265,63	5.321.481,75	9.226.767,86	3.014.205,64	1.974.898,45	9.309.065,68
2008	6.073.913,66	5.610.679,26	9.783.828,13	3.171.090,94	2.079.742,59	9.845.052,99
2009	6,359,890.74	6,014,090.87	10,892,898.45	3,330,091.77	2,979,200.89	10,370,564.30
2010	6,752,111,94	6,370,205.45	11,551,734.12	3,522,100.23	3,147,233.70	11,015,700.45

Sumber: BPS Pusat Tahun Dasar 2000

Dari Tabel 1 dan 2 nampak terlihat ketimpangan pendapatan antara Kabupaten/kota Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur periode 2000-2010. Dimana terdapat ketimpangan yang cukup signifikan pada dua daerah tersebut setiap tahunnya. Jawa Timur bagian timur merupakan wilayah yang memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding Jawa Timur bagian barat. Dari hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN ANTARA JAWA TIMUR BAGIAN BARAT DENGAN JAWA TIMUR BAGIAN TIMUR TAHUN 2004-2010”.

## B. KERANGKA TEORI

### Pembangunan Ekonomi Daerah

Mulai tahun 2001 pembangunan ekonomi daerah di Indonesia memasuki babak baru. Secara formal ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 pada tahun 2001. Pada intinya UU No. 22 tahun 1999 memuat tentang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah sementara UU No. 25 tahun 1999 memuat tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Era reformasi yang bergulir semenjak tahun 1998 membawa perubahan besar pada aspirasi daerah, kalau tadinya pemerintah pusat memainkan peran vital dalam pembangunan daerah, sistem yang sering disebut sebagai sentralistik, maka sedikit banyak reformasi telah memberikan pengaruh pada daerah berupa tuntutan untuk melaksanakan otonomi daerah secara lebih luas dan nyata. Pihak yang paling mengetahui karakteristik daerah adalah orang daerah, karena itu

perencanaan pembangunan tidak cocok lagi kalau ditentukan oleh pusat. Daerah harus diberi wewenang seluas mungkin dalam pembangunannya sehingga pembangunan dapat berjalan lebih harmonis. Argumentasi ini masuk akal mengingat karakteristik daerah di Indonesia sangat bervariasi. Bervariasinya karakteristik daerah ini menuntut pola pembangunan yang bervariasi pula dan bukan satu pola yang berlaku secara seragam untuk semua daerah.

Tuntutan yang semakin kuat ini telah memaksa pemerintah pusat menyerahkan sebagian besar wewenangnya kepada daerah. Adanya penyerahan wewenang ini diharapkan akan memberikan "ruang gerak" lebih luas kepada daerah untuk melakukan berbagai langkah konkrit dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks inilah kedua Undang-undang tersebut dilaksanakan semenjak tahun 2001. Harapan besar atas pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah, pembangunan ekonomi daerah akan berjalan lebih cepat dan terarah serta didasarkan pada kemampuan daerah. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan dengan cepat meningkat sementara demokratisasi akan berkembang secara mantap sehingga masyarakat Indonesia akan menuju pada masyarakat yang adil dan makmur.

Pemberian Otonomi daerah melalui Desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam rangka pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu :

1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Meberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Berdasarkan pendapat diatas penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Efisiensi tersebut berangkat dari pemikiran dimana dengan desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah lebih mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya sehingga akan membuat pemerintah daerah lebih tepat dalam mengalokasikan sumber daya yang ada (*allocative efficiency*).

Pengertian pembangunan ekonomi daerah menurut Arsyad (1999:108) dalam savitri 2008 adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (1996:5) dalam Putri 2010, pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan, pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Pembangunan

ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap sama. Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi menurut Irawan dan Soeparmoko (1992:5) adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang

Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets (dalam Jhingan, 2000: 57) dalam Yudha 2011, adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Jadi, dengan bukan bermaksud ‘menggurui’, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu. Boediono (1999:1-2) menyebutkan secara lebih lanjut bahwa Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan ”output perkapita”.

Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Teori pertumbuhan ekonomi dapat dibagi menjadi 2 :

#### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Historis. Frederich list (1789 - 1846)**

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menurut frederich listber adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan *Stufen theorien* (teori tangga). Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi dibagi 4 sebagai berikut :

a) Masa berburu dan mengembara.

Pada masa ini manusia belum memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pemberian alam dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri.

b) Masa berternak dan bertanam.

Pada masa ini manusia sudah mulai berpikir untuk hidup sehingga mereka bermata pencaharian bertanam.

c) Masa Bertani dan kerajinan

Pada masa ini manusia sudah hidup menetap sambil memelihara tanaman yang mereka tanam kerajinan hanya mengajar usaha sampingan.

d) Masa kerajinan, Industri, dan perdagangan.

Pada masa ini kerajinan bukan sebagai usaha sampingan melainkan sebagian kebutuhan untuk di jual ke, sehingga industri berkembang dari industry kerajinan menjadi industri besar.

## **2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik dan Neoklasik**

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Mankiw 2003:34-36)

a). Teori pertumbuhan menurut Adam Smith

*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation*, teorinya yang dibuat dengan **teori the invisible hands** (Teori tangan-tangan gaib).

Pertumbuhan ekonomi ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan :

- 1) Pertumbuhan penduduk
- 2) Pertumbuhan output total.

Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut ini:

- 1) sumber-sumber alam
- 2) tenaga kerja (pertumbuhan penduduk
- 3) jumlah persediaan

b). David Ricardo dan TR. Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh TR. Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik (Boediono,1992:81-85)

a). Robert Sollow

Robert Sollow lahir pada tahun 1950 di Brooklyn, ia seorang peraih nobel dibidang Ilmu Ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja.

b). Harrod dan Domar

RF. Harrod dan Evsey Domar tahun 1947 pertumbuhan ekonomi menurut Harrod dan Domar akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.

c). Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

## **Perkembangan Ekonomi**

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas mencakup perubahan pada tata susunan masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan menurut Jhingan (1996:4-8) dalam Putri 2010, istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Perkembangan ekonomi didefinisikan dalam tiga cara :

1. Perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam suatu jangka waktu yang panjang.
2. Perkembangan ekonomi berkaitan dengan kenaikan pendapatan nyata perkapita dalam jangka panjang.
3. Ada kecenderungan lain untuk mendefinisikan perkembangan ekonomi dari titik tolak kesejahteraan ekonomi. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional nyata perkapita naik dibarengi dengan penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan masyarakat secara keseluruhan.

## **Ketimpangan Pendapatan**

Distribusi pendapatan perseorangan (*personal distribution of income*) atau distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*) merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang diperhatikan di sini adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, entah itu bunga simpanan atau tabungan, laba usaha, utang, hadiah ataupun warisan.

Lokasi sumber penghasilan (desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan (pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) juga diabaikan.

Bila si X dan si Y masing-masing menerima pendapatan yang sama per tahunnya, maka kedua orang tersebut langsung dimasukkan ke dalam satu kelompok atau satu kategori penghasilan yang sama, tanpa mempersoalkan bahwa si X memperoleh uangnya dari membanting tulang selama 15 jam sehari, sedangkan si Y hanya onggang-onggang kaki menunggu bunga harta warisan yang didepositokannya.

Berdasarkan pendapatan tersebut, lalu dikelompokkan menjadi lima kelompok, biasa disebut kuintil (*quintiles*) atau sepuluh kelompok yang disebut desil (*decile*) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka, kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok.

Selanjutnya dihitung berapa % dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok, dan bertolak dari perhitungan ini mereka langsung memperkirakan tingkat pemerataan atau tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat atau negara yang bersangkutan.

Rasio inilah yang sering dipakai sebagai ukuran tingkat ketidakmerataan antara dua kelompok ekstrem, yaitu kelompok yang sangat miskin dan kelompok yang sangat kaya di dalam suatu negara.

### **Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi**

Ahluwalia memberikan dua (2) gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya (Sukirno,1996:61) dalam Putri 2010.

Menurut Dumairy (1996:56) dalam Putri 2010, pemerataan pembagian pendapatan dapat ditinjau dari tiga (3) segi yaitu :

- a. Pembagian pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat.
- b. Pembagian pendapatan antar daerah, dalam hal ini antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
- c. Pembagian pendapatan antarwilayah, dalam hal ini antar propinsi dan antar kawasan (barat, tengah, timur).

Sedangkan menurut Kuncoro (2003:146-145) ada tiga (3) faktor yang menyebabkan ketimpangan yaitu :

- a. Faktor pendapatan, terutama di sektor desa.
- b. Penduduk desa lebih banyak bermata pencaharian pada sektor pertanian dibandingkan penduduk kota bukan pertanian.
- c. Tebaran pendapatan yang lebih tinggi di daerah kota.

Menurut Kuznets (1955) dalam Kuncoro 2003 membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata (Kuncoro, 2003:126).

Kuznets (1955) mengemukakan bahwa ketimpangan cenderung bertambah besar pada tahap-tahap permulaan pertumbuhan dan kemudian menciut pada tahap-tahap kemudian pertumbuhan, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya menurun lagi. Profesor Kuznets mengetengahkan pemikiran bahwa di bidang pertanian pertumbuhan pada tahap awalnya akan menaikkan pendapatan petani yang lebih giat dan ini mungkin ada kaitannya dengan pendapatan menurun petani yang paling terbelakang (karena harga menurun dan pasar lenyap) sehingga memperlebar tebaran. Hal yang tidak mungkin dikesampingkan adalah teknologi, tetapi mungkin pengaruh jangka pendek. Pendapatan petani yang lebih tinggi akan tercermin dalam permintaan lebih besar akan barang jadi dan input pertanian, dan dengan demikian pembelian akan barang-barang dari kota sekitar akan meningkat. Kesempatan kerja yang lebih banyak bagi keluarga bukan petani dan petani di desa mungkin mengurangi ketimpangan.

### **Ketimpangan Pendapatan Regional**

Indikator yang digunakan untuk menganalisis Development Gap antar wilayah, diantaranya : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektorial terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur Fiskal.

Faktor-faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

1. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi wilayah
2. Alokasi Investasi
3. Tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar daerah
4. Perbedaan Sumber Daya Alam antar wilayah
5. Perbedaan Kondisi demografis antar wilayah
6. Kurang Lancarnya Perdagangan antar wilayah.

### **Teori Basis Ekonomi**

Teori basis ekonomi (*economic base theory*), dalam aplikasinya sering dinamakan sebagai analisa basis (*base analisis*) dan dalam model ini analisis perekonomian daerah/regional mengklasifikasikan menjadi dua sektor kegiatan yaitu:

1. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang datang dari luar wilayah perekonomian bersangkutan;
2. Kegiatan-kegiatan yang bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat daerah yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengekspor barang dan jasa, produksi dan pemasaran terbatas pada wilayah daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan investasi industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, dan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*).

Inti dari teori ini adalah sektor unggulan menghasilkan barang-barang dan jasa untuk dipasarkan di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor unggulan tetapi juga menaikkan permintaan akan sektor non unggulan. Berdasarkan teori ini sektor unggulan yang harus dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad, 1999:141).

Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini adalah di mana arah penekanannya terhadap arti pentingnya bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar baik secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada akan didirikan di daerah tersebut (Arsyad, 1999:116).

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan perindustrian yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Strategi pembangunan daerah yang muncul didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasinya kebijakan yang mencakup pengurangan hambatan atau batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah itu.

### **Hipotesis**

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya disparitas pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur yang dipengaruhi dengan perbedaan SDA (Sumber Daya Alam) dan

SDM (Sumber Daya Manusia) yang cenderung nampak terdapat perbedaan pada Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

2. Perbedaan sektor pendapatan yang menjadi unggulan dari kabupaten/kota Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur.
3. Adanya klasifikasi disparitas mulai dari disparitas skala kecil sampai disparitas skala besar pada Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

### C. METODE PENELITIAN

#### Indeks Entrophy Theil

Ying dalam Kuncoro (2003) dalam Imelia 2006 menjelaskan untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah bruto provinsi, juga menggunakan Indeks Ketimpangan Theil. Indeks Ketimpangan Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan wilayah dalam wilayah dan ketimpangan wilayah antar wilayah. Indeks Entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografi yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecendrungan konsentrasi geografi selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Adapun rumus untuk menghitung Indeks Entrophy Theil adalah sebagai berikut :

$$I(y) = \sum \left( \frac{y_j}{Y} \right) \times \log \left[ \left( \frac{y_j}{Y} \right) / \left( \frac{x_j}{X} \right) \right]$$

Dimana :

I(y) : Indeks Entrophy Theil.

Y<sub>j</sub> : PDRB per kapita kabupaten/kota Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur

Y : Rata-Rata PDRB per kabupaten/kota Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur

X<sub>j</sub> : Jumlah penduduk kabupaten/kota Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur.

X : Jumlah keseluruhan penduduk Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

Indeks Entrophy Theil memungkinkan kita untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ketimpangan Entrophy Theil juga dapat menyediakan pengukuran ketimpangan secara rinci dalam sub unit geografis selama periode tertentu, sedangkan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan spasial. Sebagai contoh, ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan.

Indeks Entrophy Theil yang semakin membesar menunjukkan ketimpangan yang semakin membesar pula, demikian sebaliknya, bila indeks semakin kecil, maka ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata.

#### Uji Beda *Paired Sample T-TEST*

Teknik t-tes merupakan salah satu bentuk analisis statistik inferensial yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Ada dua (2) macam t-tes, yaitu t-tes dengan sampel bebas (*independent samples t-tes*) dan t-tes sampel berhubungan (*paired samples t-test*) (Nurgiyantoro, 2004:193).

Uji t sampel berpasangan (*Paired Sample T-Test*) adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai dua (2) buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua (2) macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Perlakuan pertama mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak memberikan perlakuan sama sekali terhadap objek penelitian. Sedangkan pada perlakuan kedua, barulah objek penelitian dikenai suatu tindakan tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dipilih dengan mempertimbangkan jumlah kelompok yang diambil. Penelitian ini berdesain sampel eksperimen dan kontrol menggunakan uji t sampel berpasangan (*Paired Sample T Test*) guna mengukur rata-rata pebedaan ketimpangan distribusi pendapatan daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah.

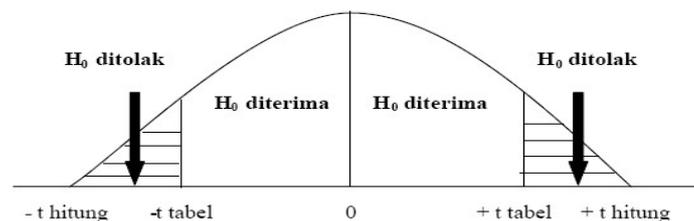
Setelah diketahui nilai t-hitung, maka untuk menginterpretasikan hasilnya berlaku ketentuan sebagai berikut :

- Jika t-hitung > t-Tabel maka H<sub>0</sub> ditolak (ada hubungan yang signifikan).
- Jika t-hitung < t-Tabel maka H<sub>0</sub> diterima (tidak ada hubungan yang signifikan).

Untuk mengetahui t-tabel digunakan ketentuan n-1 pada *level of significance* (α) sebesar 5% (tingkat kesalahan 5% atau 0,05) atau taraf keyakinan 95% atau 0,95. Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel lebih dari 5%

Berarti variabel tersebut tidak signifikan. Daerah penolakan dan penerimaan (nilai kritis t) dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1: Daerah Penolakan dan Penerimaan Uji t



Sumber: Nurgiyantoro, 2004:193

#### Analisis Location Quotient

*Location Quotient* (LQ) merupakan suatu teknik analisis yang dimaksudkan untuk menentukan potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktivitas ekonomi utama atau untuk menentukan sektor unggulan yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri maupun daerah lain yang ada di sekitarnya. LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor disuatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut secara nasional.

Rumus menghitung LQ (Robinson, 2006:35)

$$LQ = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t} = \frac{v_i/V_t}{v_t/V_t}$$

Keterangan :

1. Bila LQ > 1 menunjukkan sektor tersebut tergolong sektor basis di suatu daerah.
2. Bila LQ < 1 menunjukkan sektor tersebut tergolong sektor non basis di suatu daerah.
3. Bila LQ = 1 menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sektor tersebut di suatu daerah.

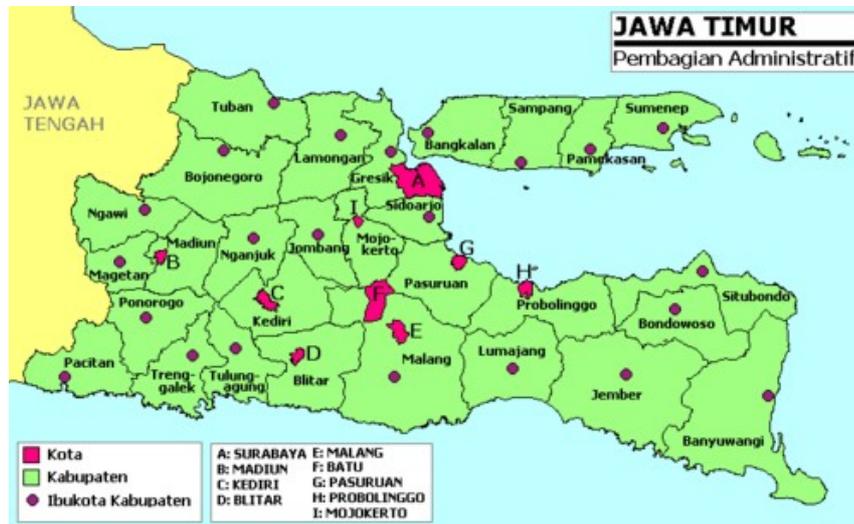
Sumber: Robinson, 2006:35

## D. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Geografis

Jawa Timur sebagai bagian Dari Negara Republik Indonesia memiliki pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang - Undang tersebut daerah ini memiliki otonomi. Artinya bahwa Jawa Timur merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berhak dan berwenang serta berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam dalam ikatan Negara Kesatuan sesuai undang – undang yang berlaku.

Gambar 2: Peta Administratif Jawa Timur



Sumber : BPS Jawa Timur

Luas Wilayah Jawa Timur : 47.922 Km<sup>2</sup>. Propinsi Dati 1 Jawa Timur terletak pada 110°30BT Sampai 116°30BT 9° 0'LS sampai 4°50'LS. Batas – batas wilayah administrasi Jawa Timur meliputi:

- a. Utara : Laut Jawa
- b. Timur : Laut Bali dan Selat Bali
- c. Barat : Provinsi Jawa Tengah
- d. Selatan : Samudra Hindia

Bentangan jarak wilayah Jawa Timur dari barat ke timur sekitar 400km. Lebar bentangan utara sampai selatan di bagian barat sekitar 200km, namun di bagian timur lebih sempit sekitar 60km. Terdapat penggunaan tanah lahan :

1. Persawahan : 12.483,66 km<sup>2</sup>
2. Pertanian Tanah kering : 11.619,32 km<sup>2</sup>
3. Kebun campur : 613,36 km<sup>2</sup>
4. Perkebunan : 1.518,39 km<sup>2</sup>
5. Hutan : 12.251,24 km<sup>2</sup>
6. Padang Rumput/Tanah kosong : 236,82 km<sup>2</sup>
7. Rawa/Danau/Waduk : 88,75 km<sup>2</sup>
8. Tambak/Kolam : 705,82 km<sup>2</sup>
9. Tanah tandus/Rusak/Alang-alang : 1.323,53 km<sup>2</sup>

Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Timur pada Tahun 2005 adalah 37.070.731 jiwa, dengan kepadatan 774 jiwa/km<sup>2</sup>.

Jika dilihat dari sudut pandang Budaya dan Adat Istiadat, pembagian wilayah juga dapat dilihat dari Budaya dan adat istiadat yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Timur terbagi atas 2 bagian : Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur. Kebudayaan dan adat istiadat Suku Jawa di Jawa Timur bagian barat menerima banyak pengaruh dari Jawa Tengah, sehingga kawasan ini dikenal sebagai Mataraman; menunjukkan bahwa kawasan tersebut dulunya merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Mataram. Daerah tersebut meliputi eks-Karisidenan Madiun (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan). Dan juga bias dipengaruhi oleh bentuk arsitektur. Sedangkan pada wilayah di Jawa Timur Bagian Timur bisa dikenal sebagai daerah Tapal Kuda. Dinamakan Tapal Kuda, karena bentuk kawasan tersebut dalam peta mirip dengan bentuk Tapal Kuda, daerah Tapal Kuda meliputi (Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi)

Pada budaya dan adat Istiadat perbedaan kebiasaan antara masyarakat Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur sangat tampak jelas karena dipengaruhi oleh etnisitas di

Jawa Timur yang lebih heterogen. Jadi tampak perbedaan dalam mencari mata pencaharian antara masyarakat Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa timur bagian Timur yang masi memegang budaya dan adat istiadat setempat.

### Keadaan Demografis

Komposisi jumlah penduduk dan penyebarannya memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembangunan. Penduduk yang banyak akan terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang merupakan potensi pasar yang sangat potensial. Kondisi ini akan lebih baik lagi jika komposisinya menguntungkan, yakni didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, apalagi jika disertai dengan kualitas yang baik dengan tingkat penyebaran merata pada setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, menurut BPS Jawa Timur jumlah penduduk Jawa Timur bertambah dari sebanyak 21,8 juta pada tahun 1961 menjadi 25,5 juta pada tahun 1971. Pada tahun 1980 jumlah tersebut bertambah menjadi 29,2 juta, berturut turut pada tahun 1990 menjadi 32,5 juta, tahun 2000 menjadi 34,8 juta dan di tahun 2010 menjadi 37,5 juta. Hasil sensus penduduk tahun 2010 secara rinci jumlah penduduk 37.476.011 orang yang terdiri atas 18.488290 laki-laki dan 18.987.721 perempuan. Dibanding provinsi lainya, Jawa Timur menduduki posisi ke dua terbesar setelah Jawa Barat. Berdasar jumlah penduduk per kab/kota di Jawa Timur jumlahnya bervariasi jumlah yang tertinggi ada pada kota Surabaya sebanyak 2.765.908 jiwa dan terendah di Kota Mojokerto sebanyak 120.132 jiwa. Luas Wilayah dan jumlah penduduk dari Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur tahun 2004-2010 dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 3: Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur Tahun 2004-2010

No	Jawa Timur bagian Barat	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Pacitan	1,342.42	538,583	546,150	549,768	553,865	557,029	558,644	540,756
2	Ponorogo	1,371.78	869,655	880,701	885,986	892,527	895,921	899,074	855,087
3	Madiun	1,010.86	657,158	664,282	667,709	667,841	642,518	642,638	662,249
4	Magetan	688.82	622,112	621,511	621,862	622,966	625,424	626,092	620,216
5	Ngawi	1,295.98	840,172	851,884	857,449	860,029	834,847	836,767	817,123
No	Jawa Timur bagian Timur	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
			2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Probolinggo	1,599.03	1,041,498	1,059,322	1,070,137	1,081,063	1,043,671	1,044,237	1,096,933
2	Lumajang	1,790.90	1,000,260	1,017,839	1,026,400	1,034,334	1,024,849	1,028,103	1,007,251
3	Jember	2,477.68	2,239,575	2,263,794	2,278,718	2,293,740	2,320,844	2,327,957	2,349,213
4	Bondowoso	1,560.10	710,339	720,183	725,571	727,790	707,242	708,905	737,347
5	Situbondo	1,638.81	621,624	631,382	636,200	638,537	623,042	624,888	648,249
6	Banyuwangi	5,782.68	1,539,393	1,564,026	1,575,265	1,580,441	1,531,753	1,535,701	1,556,101

Sumber : BPS, Jawa Timur

Jumlah penduduk yang tidak sama pada setiap kabupaten/kota antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Nampak pada Jawa Timur bagian Barat wilayah yang mempunyai penduduk paling padat mulai tahun 2004-2010 adalah wilayah Ponorogo dengan luas Wilayah mencapai 1,371.78 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk mulai tahun 2004-2010 sebesar 6,178,951(jiwa). Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah wilayah pacitan dengan luas wilayah 1,342.42 km<sup>2</sup> hanya dengan kepadatan penduduk 3,844,795(jiwa). Pada Jawa Timur bagian Timur wilayah yang mempunyai penduduk paling padat mulai tahun 2004-2010 adalah wilayah Jember dengan luas wilayah 2,477.68 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk sebesar 16,073,841(jiwa). Sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah wilayah Situbondo dengan luas wilayah 1,638.81 km<sup>2</sup> hanya dengan kepadatan penduduk 4,423,922(jiwa).

Rata-rata laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur selama periode 2004-2010 terdapat pada wilayah Probolinggo sebesar 0,90 persen. Rata-rata laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur yang dirinci selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4: **Rata-rata Laju Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Di Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur Tahun 2004-2010**

No	Jawa Timur bagian Barat	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2 (jiwa)
1	Pacitan	0,08	2864,08
2	Ponorogo	-0,26	4504,33
3	Madiun	0,15	4554,93
4	Magetan	-0,05	6329,93
5	Ngawi	-0,45	4551,21
No	Jawa Timur bagian Timur	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2 (jiwa)
1	Probolinggo	0,90	4650,86
2	Lumajang	0,12	3986,28
3	Jember	0,80	6487,46
4	Bondowoso	0,64	3228,88
5	Situbondo	0,72	2699,47
6	Banyuwangi	0,19	1881,94

Sumber : BPS Jatim, diolah

#### Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Timur

Kondisi perekonomian provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto PDRB atas Dasar Harga Konstan sebagai salah satu indikator ekonomi provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan selama periode 2004 - 2010.

Besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tentunya didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor yang ada didalamnya. Dari sembilan (9) sektor yang membentuk PDRB, adapun sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 5: **Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha ADHK 2000 Periode 2004-2010**

PDRB Jawa Timur (Juta Rupiah)	
2004	242,228,892.17
2005	256,374,726.78
2006	271,249,316.66
2007	287,814,183.92
2008	304,796,966.41
2009	319,531,678.78
2010	340,614,870,45

Sumber: BPS, Jawa Timur

Jika dilihat dari Sembilan (9) sektor pendukung PDRB Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa sektor perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor unggulan di provinsi Jawa Timur karena merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar. Setelah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran diikuti sektor industri pengolahan. Meskipun sektor pertanian menempati sektor yang berada pada unggulan ke tiga dari sembilan sektor yang ada, akan tetapi jika dilihat

dari banyaknya penduduk yang masih bergantung pada sektor pertanian dan masih banyaknya lahan pertanian, maka bukan tidak mungkin potensi ekonomi Provinsi Jawa Timur juga bertumpu pada sektor pertanian.

### **Analisis PDRB Perkapita Pada Daerah Jawa Timur Bagian Barat Dan Jawa Timur Bagian Timur**

Dalam penelitian ini menggunakan PDRB Kabupaten/Kota Jawa Timur menurut lapangan usaha atas harga konstan 2000. Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan melihat PDRB perkapita, di mana semakin besar PDRB perkapita suatu daerah, bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan rakyatnya dan sebaliknya. PDRB perkapita merupakan total dari PDRB atas dasar harga konstan suatu daerah suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu.

Salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan melihat PDRB perkapita, dimana semakin besar PDRB perkapita suatu daerah, bisa diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan rakyatnya dan sebaliknya. PDRB perkapita merupakan total dari PDRB atas harga konstan suatu daerah pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Laju perkembangan PDRB perkapita.

Perbedaan besarnya PDRB dan PDRB perkapita kabupaten/kota Jawa Timur bagian barat dan Jawa Timur bagian Timur adanya perbedaan sosial dan budaya antara Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur Bagian Timur selain itu besarnya luas wilayah antara Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur serta laju pertumbuhan penduduk yang membuat adanya perbedaan PDRB.

### **Analisis Entrophy Theil**

Entrophy Theil adalah salah satu cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan wilayah bruto. Indeks ketimpangan Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan wilayah dalam wilayah pada Jawa Timur bagian Barat wilayahnya antara lain Pacitan, Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo dan pada Jawa Timur bagian Timur antara lain Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Dan ketimpangan wilayah antar wilayah antara lain Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Jika dilihat pada sisi ketimpangan pendapatan wilayah dalam wilayah, pada Jawa Timur bagian Barat setiap wilayahnya dari tahun 2004-2010. Terjadi ketimpangan pendapatan antar wilayahnya walaupun tidak terlalu signifikan, sedangkan pada Jawa Timur bagian Timur juga mengalami ketimpangan pendapatan di setiap wilayahnya pada tahun 2004-2010. Dalam ketimpangan pendapatan pada bagian antara wilayah dan wilayah, pada Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur terdapat ketimpangan pendapatan yang cukup besar. Pada tabel 4.4 tampak adanya ketimpangan pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur

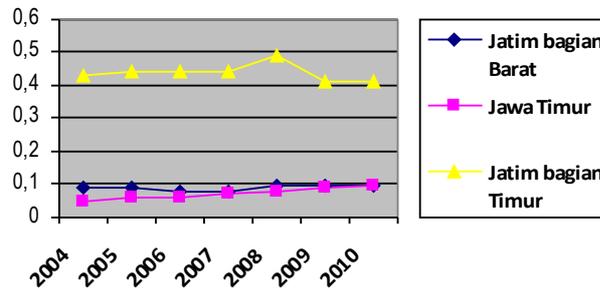
**Tabel 6: Indeks Entrophy Theil Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur Tahun 2004-2010**

<b>Tabel Indeks Entropy Theil Periode Tahun 2004-2010</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Jawa Timur bagian Barat</b>	<b>Jawa Timur bagian Timur</b>
<b>2004</b>	0.092	0.428
<b>2005</b>	0.085	0.437
<b>2006</b>	0.085	0.438
<b>2007</b>	0.085	0.438
<b>2008</b>	0.100	0.488
<b>2009</b>	0.100	0.412
<b>2010</b>	0.102	0.409
<b>Rata-Rata</b>	0.093	0.436

Sumber: Data BPS Jawa Timur, diolah

Dengan rata – rata Indeks Entrophy Theil sebesar 0,093 pada Jawa Timur bagian Barat tahun 2004 – 2010 dan pada Jawa Timur bagian Barat sebesar 0,436 maka tampak adanya ketimpangan pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

Grafik 1: **Posisi Indeks Entrophy Theil Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur terhadap Indeks Entrophy Theil Propinsi Jawa Timur**



Sumber: Data BPS Jawa Timur, diolah

Indeks Entrophy Theil Jawa Timur yang semakin mendekati nol menandakan semakin berkurangnya ketimpangan pendapatan di Jawa Timur tetapi jika melihat pada Jawa Timur bagian Timur yang semakin menjauh dari nol dan semakin mendekati angka satu dan pada Jawa Timur bagian Barat yang posisinya masi di atas Propinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada grafik 4.1 maka nampak jelas adanya ketimpangan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

#### Analisis Uji Beda *Paired Sample T-Test*

Dari hasil indeks Entrophy Theil pada tabel 4.4 maka dilakukan Uji t sampel berpasangan (*Paired Sample T-Test*) untuk menguji hipotesis guna mengukur rata-rata perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Dan dapat diambil keputusan sebagai berikut :

Ho : Perbedaan disparitas pendapatan Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur sama.

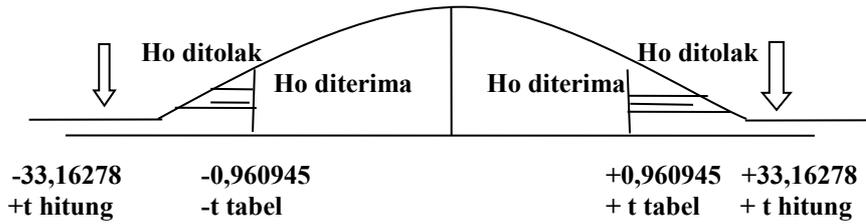
H1 : Perbedaan disparitas pendapatan Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Barat tidak sama.

Untuk mengetahui t-tabel digunakan n-1 pada *level of significance* ( $\alpha$ ) sebesar 5 persen (tingkat kesalahan 5 persen atau 0,05) atau taraf keyakinan 95 persen atau 0,95 . Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variable lebih dari 5 persen berate variable tersebut tidak signifikan.

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa rata-rata perbedaan disparitas pendapatan anantara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur = 0,264292 dan t hitung = -33,16278. T tabel perlu dihitung dengan ketentuan bahwa alfa ( $\alpha$ ) adalah sebesar 0,05 dan df = 13 (13-1=12). Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa besarnya t tabel adalah 0,960945. Terlihat bahwa t hitung > t tabel dengan demikian Ho ditolak dan H1 diterima. Implikasinya ialah bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur adalah tidak sama.

Kemudian untuk memperkuat bahwa adanya selisih rata – rata antara ketimpangan distribusi pendapatan Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur adalah karena adanya perbedaan sektor unggulan dan luas wilayah yang menyebabkan adanya ketimpangan perlu dilakukan uji hipotesis yang dilakukan secara dua sisi (*two tailed*) Seperti pada grafik berikut :

Gambar 3: Daerah Penolakan Dan Penerimaan Uji t



Sumber: Nurgiyantoro, 2004:193, diolah

Ho ditolak maka t hitung jatuh di daerah penolakan oleh karena itu H1 diterima. Kesimpulannya ialah ketimpangan distribusi pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur

#### **Analisis Location Quotient**

**Location Quotient** (LQ) merupakan suatu teknik yang dimaksudkan untuk menentukan potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktivitas ekonomi utama atas untuk menentukan sektor unggulan yaitu sektor unggulan yaitu sektor yang dapat memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri maupun daerah lain yang ada di sekitarnya. LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan secara nasional.

Tabel 4.5: **LQ Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur tahun 2004-2010**

Sumber : BPS, PDRB Wilayah Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur tahun 2004-2010,diolah

NILAI LQ JATIM BAGIAN TIMUR & BARAT TAHUN 2004 – 2010														
LAPANGAN USAHA	TAHUN 2004		TAHUN 2005		TAHUN 2006		TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010	
	TIMUR	BARAT												
1. PERTANIAN	1.04	0.88	1.05	0.87	1.05	0.87	1.05	0.86	1.05	0.85	1.05	0.84	1.05	0.86
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.11	0.67	1.12	0.66	1.12	0.65	1.12	0.64	1.13	0.63	1.13	0.61	1.14	0.59
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.09	0.75	1.08	0.78	1.07	0.80	1.06	0.81	1.06	0.82	1.06	0.84	1.06	0.83
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.00	0.99	1.00	1.00	0.96	1.11	0.96	1.13	0.96	1.13	0.95	1.14	0.96	1.11
5. KONSTRUKSI	0.76	1.69	0.75	1.71	0.75	1.73	0.74	1.75	0.74	1.76	0.73	1.80	0.72	1.82
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	0.98	1.05	0.98	1.04	0.99	1.03	0.99	1.04	0.99	1.04	0.99	1.04	0.99	1.02
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	1.04	0.88	1.04	0.88	1.04	0.89	1.03	0.90	1.03	0.91	1.02	0.94	1.02	0.93
8. KEU. REAL ESTAT, & JASA PERUSAHAAN	1.02	0.93	1.02	0.93	1.02	0.94	1.02	0.94	1.02	0.95	1.01	0.97	1.01	0.97
9. JASA-JASA	0.82	1.50	0.83	1.51	0.83	1.51	0.83	1.49	0.83	1.49	0.84	1.48	0.85	1.45

Berdasarkan analisis *location Quotient* (LQ) periode 2004 -2006, pada daerah Jawa Timur bagian Barat terdapat beberapa sektor yang selalu menjadi sektor basis ( $LQ > 1$ ) yaitu sektor konstruksi dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Begitu juga sektor jasa juga menjadi sektor basis pada Jawa Timur bagian Barat. Ketiga sektor tersebut yang menjadi sektor basis pada tahun 2004 -2010 pada Jawa Timur bagian Barat.

Pada Jawa Timur bagian Timur selama kurun waktu 2004 – 2010 sektor yang selalu menjadi sektor basis ada 3 sektor mulai dari sektor pertanian, sektor pertambangan & penggalian, dan industry pengolahan. Pada sektor listrik, gas, dan air bersih sempat menjadi sektor basis pada tahun 2004, dan 2005 sedangkan mulai dari tahun 2006 – 2010 sektor tersebut menjadi sektor non basis.

## **Pembahasan**

### **Hipotesis Kuznets Pada Disparitas Pendapatan Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Barat**

Untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan yang terjadi pada Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur dengan menggunakan Hipotesis Kuznets. Simon Kuznets mengemukakan bahwa mula – mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata.

Dari tabel 4.4 dapat diketahui adanya ketimpangan pada wilayah Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur periode 2004 -2010. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan tidak berlaku pada Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur pada periode 2004 – 2010.

Disparitas yang muncul pada Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur terjadi karena adanya perbedaan SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) dikarenakan etos kerja dari SDM dan anugrah SDA yang berbeda antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.

### **Perbandingan Tingkat Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur**

Dengan menggunakan Uji Beda Paired Sample T-Test dari hasil perhitungan Indeks Entrophy Theil tahun 2004 – 2010 diketahui bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $33,16278 > 0,960945$ ) dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur ada perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur adalah tidak sama. Perbedaan ketimpangan yang terjadi pada dua wilayah Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur sangat kuat dipengaruhi oleh faktor perbedaan karakteristik masing – masing wilayah.

### **Pengembangan Sektor Unggulan Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur.**

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) pada Jawa Timur bagian Barat terdapat sektor konstruksi dan sektor perdagangan yang selalu menjadi sektor basis selama kurun waktu 2004 – 2010. Perkembangan sektor basis ini didukung oleh wilayah – wilayah yang berada pada Jawa Timur bagian Barat dan berbatasan secara langsung dengan Jawa Tengah yang merupakan akses penghubung ke Ibukota Negara.

Sedangkan pada Jawa Timur bagian Timur terdapat terdapat sektor pertanian, sektor pertambangan & penggalian dan sektor industri pengolahan yang selalu menjadi sektor basis mulai dari tahun 2004 – 2010. Pada tahun 2004 dan 2005 sektor listrik, gas, & air bersih sempat menjadi sektor basis tetapi setelah tahun 2005 sektor tersebut menjadi sektor non basis. Perkembangan sektor basis ini dipengaruhi dengan luas wilayah dari Jawa Timur bagian Timur yang sangat luas dan mempunyai potensi dalam penunjang sektor basis dari wilayah Jawa Timur bagian Timur. Dan besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian memang bisa dipahami karena sektor ini tidak menuntut keterampilan atau pendidikan formal yang tinggi untuk sekedar menjadi buruh tani.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan terhadap “Analisis Disparitas Kabupaten/Kota Jawa Timur bagian Barat dan Kabupaten/Kota Jawa Timur bagian Timur Tahun 2004-2010”

1. Ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan hasil analisis Indeks Entropy Theil pada wilayah Jawa Timur bagian Barat terdapat ketimpangan antar wilayah yang berada pada Jawa Timur bagian Barat (Pacitan, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun) dan wilayah Jawa Timur bagian Timur (Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi) . Ketimpangan yang terjadi tidak hanya terjadi pada wilayah yang ada di Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur tetapi juga adanya ketimpangan pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur. Dari hasil Indeks Entropy Theil kemudian dilakukan uji t sampel berpasangan (*Paired Sample T-Test*) dengan hasil analisis yaitu t hitung > t tabel dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antara wilayah Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan wilayah Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur adalah tidak sama.
2. Perbedaan ketimpangan yang terjadi pada Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur ini sangat kuat dipengaruhi oleh faktor perbedaan karakteristik SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia), perbedaan anugrah SDA Jawa Timur bagian Timur lebih memberikan kontribusi yang bisa membuat pendapatan wilayah yang berada di Jawa Timur bagian Timur lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur bagian Barat. Dan Jumlah penduduk dari Jawa Timur bagian Timur lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Timur bagian Barat yang mempunyai efek pemaksimalan dalam penyerapan tenaga kerja yang dapat membantu peningkatan pendapatan penduduk di wilayah Jawa Timur bagian Timur.
3. Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ) sektor unggulan Jawa Timur bagian Barat adalah sektor konstruksi dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Perkembangan sektor ini didukung oleh letak wilayah Jawa Timur bagian Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah yang merupakan akses menuju arah Ibukota Negara sehingga mendukung perkembangan potensi wilayah tersebut. Sedangkan sektor unggulan pada Jawa Timur bagian Timur adalah sektor pertambangan & dan penggalian, sektor industry pengolahan, dan sektor pertanian. Perkembangan sektor pertanian ini didukung oleh luas lahan yang dimiliki pada wilayah Jawa Timur bagian Timur dan besarnya tingkat penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian karena sektor ini tidak menuntut ketrampilan atau pendidikan formal yang tinggi untuk sekedar menjadi buruh tani, sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian didukung oleh karakteristik wilayah Jawa Timur bagian Timur yang mempunyai SDA (Sumber Daya Alam) yang dapat dimanfaatkan seperti pasir dan batu kali yang secara letak dekat dengan daerah pegunungan yang masi aktif sehingga dapat berpengaruh pada kesuburan tanah. Pada Jawa Timur bagian Timur sektor – sektor tersebut dapat melakukan penyerapan tenaga kerja secara besar karena tidak menuntut keterampilan atau pendidikan formal dalam penyerapan tenaga kerjanya.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pembangunan ekonomi yang merata pada Jawa Timur bagian Barat dapat ditingkatkan lebih ditujukan pada sektor-sektor selain sektor basis pembangunan ekonomi lebih merata serta meminimalisar adanya dispariatis pendapatan antara Jawa Timur bagian Barat dengan Jawa Timur bagian Timur.
2. Perlu adanya usaha aktif dari pemerintah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pendapatan Jawa Timur khususnya Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur. Terutama pada penyebaran penduduk agar membuat imbang antara luas wilayah dengan jumlah penduduk agar potensi di setiap wilayah dapat dimaksimalkan dengan tujuan adanya pertumbuhan ekonomi pada Jawa Timur bagian Barat.

3. Lebih meningkatkan dalam pengontrolan SDA dari setiap wilayah Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Timur bagian Timur agar menghasilkan pembangunan ekonomi yang maksimal antara Jawa Timur bagian Barat dan Timur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *Jawa Timur Dalam Angka*. Tahun 2004 - 2010.
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. *PDRB kabupaten/kota Jawa Timur*. Tahun 2004 – 2010.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Bhinadi, 2008. “*Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dengan Luar Jawa*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. UNAIR
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Gama Ayu Savitri. 2006. “*Disapritas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar Kabupaten/kota di Provinsi Bali*”. Skripsi. Fakultas Ekonomi. UNUD.
- Irawan dan Soeparmoko. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE
- Jhingan, M.L. 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kantor Perwakilan Jawa Timur. 2011. *Sekilas Tentang Budaya Jawa Timur*. Artikel. Di post oktober 13, 2011. [www.KantorPerwakilanJawaTimur.com](http://www.KantorPerwakilanJawaTimur.com). Diakses 28 maret 2012.
- Kuncoro. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Modul Kuliah. 2006. *Ekonomi Regional*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jambi.
- Mankiw, G.N. 2003. *Teori Makroekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mustika. 2011. *Teori Pertumbuhan Ekonomi Historisa Frederich list* . Artikel. Dipost januari 10, 2011. [www.mustika.blogspot.com](http://www.mustika.blogspot.com). Diakses 28 maret 2012.
- Nurgiyantoro. 2004. *Statistik Terapan Untuk Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Yogyakarta : Diterbitkan dan dicetak oleh Gajah Mada University Press Anggota IKAPI.
- Putri Hera Pramesti. 2010. “*Disparitas Pendapatan Kabupaten Kendal*” (*Studi Kasus Dataran Rendah Dan Datran Tinggi*). Skripsi. Fakultas Ekonomi. UNDIP
- Sukirno, S. 1996. *Mikro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta : LPFE UI
- Suharto, 2007. “*Disparitas Dan Pola Spesialisasi Tenaga Kerja Industri Regional 1993–1996 Dan Prospek Pelaksanaan Otonomi*”. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi UI
- Todaro, M.P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Tarigan. R. 2005. *Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 Tentang Pembagian kekuasaan dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Yudha Eka Purna. 2011. “*Pelayanan Publik, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Disparitas Pembangunan Wilayah*”. Tesis. Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. IPB. Bogor.